

ORIENTASI BUDAYA DAN RELIGIUSITAS DALAM MANAJEMEN KREDIT SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA SOSIAL BANK PERKREDITAN RAKYAT

Hesi Eka Puteri¹⁾ dan Zuwardi²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Bukittinggi

email:¹hesiekaputeri@gmail.com

²zuwardi80@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study investigates the implementation of culture and religiosity in credit management and then attempts to analyze the effect of culture and religiosity to the breadth of outreach in Rural Banks. This research is a quantitative study based on a survey at Rural Banks in West Sumatera Indonesia in 2018, with a sample of 52 Rural Bank. Data were collected by using questionnaire and analyzed by PLS-regression.. The independent sample t-test also applied to compare the breadth of outreach or social performance in Conventional Rural Banks and Islamic rural banks. This study proves that the breadth of outreach is influenced by culture and religiosity and there is no difference of the breadth of outreach between Conventional Rural Bank and Islamic Rural Bank. These finding extends the predictor of the breadth of outreach in Rural Banks and offer a more established model of causal relationships between culture and religiosity to the breadth of outreach. This study also proves that there is no difference in the breadth of outreach between Conventional Rural Banks and Islamic Rural Banks, which means that there are no differences in the achievement of the social performance of these two types of micro financial institutions.

Keywords: *breadth of outreach; culture; religiosity; rural bank*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi aspek budaya dan religiusitas dalam manajemen kredit untuk kemudian mengelaborasi lebih lanjut pengaruh faktor budaya dan religiusitas terhadap keluasan jangkauan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berdasarkan survey pada BPR di Provinsi Sumatera Barat Indonesia pada tahun 2018, dengan sampel sebanyak 52 BPR. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan Regresi PLS untuk memprediksi dampak budaya dan religiusitas terhadap keluasan jangkauan. Uji-independent sample t - test juga diterapkan untuk membandingkan keluasan jangkauan BPR Konvensional dan BPR Syariah. Penelitian ini membuktikan bahwa keluasan jangkauan dipengaruhi oleh budaya dan religiusitas dan tidak ada perbedaan keluasan jangkauan antara BPR Konvensional dan BPR Syariah. Temuan ini memperluas prediktor keluasan jangkauan di Bank Perkreditan Rakyat dan menawarkan model hubungan sebab akibat yang lebih mapan antara budaya dan religiusitas terhadap keluasan jangkauan. Penelitian ini juga membuktikan bahwa tidak ada perbedaan keluasan jangkauan antara BPR Konvensional dan BPR Syariah, yang berarti tidak ada perbedaan dalam pencapaian kinerja sosial kedua jenis lembaga keuangan ini.

Kata kunci: *BPR; budaya; keluasan jangkauan; religiusitas*

Detail Artikel :

Diterima : 13 Januari 2018

Disetujui : 21 Januari 2019

[DOI : 10.22216/jbe.v4i1.3895](https://doi.org/10.22216/jbe.v4i1.3895)

PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan sebuah lembaga keuangan yang direkomendasi oleh pemerintah untuk melayani sektor riil terutama usaha kecil dan mikro. Secara regulatif, Bank Perkreditan Rakyat terkategori sebagai lembaga keuangan mikro, yang kebijakan pengembangannya bertujuan untuk memberikan layanan keuangan kepada usaha kecil dan mikro serta masyarakat lokal khususnya di daerah pedesaan. Undang Undang No.7/1992 tentang Perbankan yang diubah dengan UU No.10/1998 menyebutkan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Lebih lanjut, penjelasan Undang-Undang No.7/1992 tentang perbankan pasal 14 menyebutkan bahwa kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan.

Dalam operasional BPR, terdapat dua target kinerja yaitu kinerja finansial dan kinerja sosial. Kinerja finansial berhubungan dengan profitabilitas dan sustainabilitas dari BPR sedangkan kinerja sosial berhubungan dengan misi tanggungjawab sosial yang diemban oleh BPR. Kinerja sosial ini dapat diukur dengan jangkauan, yaitu sebuah pengukuran yang memperlihatkan sejauhmana keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mampu untuk memberikan dampak pengembangan ekonomi atau sejauh mana sebuah LKM telah mencapai tujuannya dalam memberikan manfaat sosial bagi masyarakat miskin (Schreiner, 2002; Yaron, 1997; USAID, 2006)

Perdebatan utama dalam pencapaian target kinerja sosial adalah kesulitan untuk mencapai kinerja finansial yang bagus dengan kinerja sosial yang juga bagus. Kondisi *trade-off* seringkali terjadi, dimana pencapaian kinerja finansial yang bagus justru menyebabkan buruknya kinerja sosial atau sebaliknya (Olivares-Polanco, 2005; Christen & Rhyne, 1995; Rama K & Ph, D, 2014). Namun demikian beberapa studi menemukan bahwa kedua target kinerja ini dapat dicapai secara bersamaan (Zerai & Rani, 2012; Qinlan & Izumida, 2013; Millson, 2013; Gakhar, 2015). Hal ini membuktikan bahwa kinerja sosial tidak selalu memperburuk kinerja finansial lembaga keuangan mikro.

Dalam konteks teoritis, tujuan ganda lembaga keuangan mikro ini merupakan sesuatu yang kontradiktif. Schreiner (2002) mengungkapkan bahwa fungsi sosial sebuah lembaga keuangan mikro akan tercapai jika tingkat rata-rata pinjaman kecil atau jumlah nasabah pinjaman meningkat. Secara ekonomis, keuntungan maksimum justru akan tercapai jika terdapat perbedaan terbesar antara total keuntungan dengan total biaya. Akan lebih menguntungkan bagi pihak lembaga keuangan untuk tidak menawarkan pinjaman dalam jumlah yang kecil-kecil ke banyak nasabah. Dengan kata lain, akan lebih baik bagi pihak lembaga keuangan untuk menyalurkan pinjaman dalam jumlah yang tidak terlalu kecil namun layak secara finansial. Hal ini disebabkan karena pinjaman dalam jumlah yang kecil-kecil justru akan meningkatkan biaya operasional. Sementara itu, kinerja sosial yang baik justru akan dicapai jika pinjaman yang di salurkan memiliki rata-rata yang kecil dengan jumlah nasabah kredit yang dilayani dalam jumlah besar. Alasan ekonomis ini yang menjadi salah satu alasan kenapa sulit bagi pihak lembaga keuangan untuk mensejalkan kinerja sosial dengan kinerja finansial mereka.

Walaupun demikian, teramati bahwa beberapa BPR memperlihatkan kinerja sosial yang bagus dengan kinerja finansial yang juga bagus. Beberapa faktor komersialisasi seperti faktor profitabilitas, kompetisi dan regulasi, teridentifikasi sebagai penyebab keluasan jangkauan pinjaman di lembaga keuangan mikro (Christen, 2001; Francisco Olivares-Polanco, 2005). Beberapa studi lainnya juga memprediksi adanya pengaruh yang positif antara faktor-faktor komersialisasi ini terhadap *financial sustainability* dan jangkauan lembaga keuangan (Paxton, 2003; Zerai & Rani, 2012; Zhang & Kipsha, 2013; Gashayie, 2014; Kaur, 2014).

Meski faktor komersialisasi adalah faktor penting pencapaian kinerja sosial di lembaga

keuangan, tidak berarti faktor nonkomersialisasi seperti budaya dan religiusitas tidak mempengaruhi pencapaian target fungsi sosial di lembaga keuangan mikro. Aspek ini perlu dielaborasi lebih lanjut mengingat pangsa pasar utama dari BPR adalah masyarakat yang “*excluded*” lembaga keuangan formal dan pada umumnya berada di wilayah perdesaan. Karakteristik segmen pasar ini hanya dapat dikontrol dengan peraturan informal seperti peraturan sosial budaya atau kebiasaan yang membentuk perilaku nasabah tersebut. Lembaga keuangan mikro adalah institusi yang dinamis, inovatif dan memiliki tata kelola yang fleksibel, yang terbentuk berdasarkan lingkungan sosial dan kondisi ekonomi lokal, yang dengan demikian menyebabkan lembaga keuangan mikro beroperasi di wilayah dimana kondisi sosial ekonomi mempengaruhi dan dipengaruhi olehnya. Beberapa studi terdahulu mengungkapkan bahwa sosial ekonomi dan budaya mempengaruhi capaian kinerja sosial LKM (Wollni, 2001; Osotimehin, W.L, Keer, & R., 2011; Ahlin, Lin, & and Michael Maio, 2011). Deubeul (2003) dan Phlong (2009) juga mengungkapkan bahwa budaya lokal merupakan aspek penting yang mesti diterapkan di dalam manajemen LKM seperti halnya dalam lembaga keuangan mikro Islam. Lebih lanjut, Erdmann, Horne, Kaletta & and Marius Wagner (2012.) menyatakan bahwa pengaruh budaya terhadap eksistensi lembaga keuangan mikro, terjadi melalui apa yang disebut dengan “kohesi sosial”. Sedangkan Arsyad (2008) menyebutkan bahwa faktor sosio kultural sebagai institusi informal yang memainkan peranan penting bagi kesuksesan LKM dalam menjangkau sektor mikro. Semua opini ini mengarah pada kesimpulan bahwa faktor ekonomi sosio kultural merupakan aspek penting yang mempengaruhi kinerja lembaga keuangan. Meskipun demikian, studi terdahulu tidak mengkuantifikasi secara jelas pengaruh budaya yang diaplikasikan dalam manajemen kredit sebagai determinan dari capaian kinerja sosial.

Sistem *Dual Banking* yang diterapkan di berbagai negara termasuk juga di Indonesia, memberikan peluang bagi perkembangan BPR dengan konsep Islam yang mengimplementasikan aspek religiusitas dalam operasionalnya. BPR yang berkonsep Islam ini populer dengan nama BPR Syariah. Perkembangan BPR Syariah yang belum stabil, keterbatasan jaringan menyebabkan belum banyak studi yang mengkuantifikasi secara jelas pengaruh penerapan aspek religiusitas dalam manajemen kredit terhadap capaian kinerja sosial. Seibel (2008.) dan Aslam (2015) menggambarkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dicirikan dengan karakteristik religiusitas dalam operasionalnya mempengaruhi eksistensi LKMS di Indonesia. Farooq dan Khan (2014) membuktikan bahwa LKMS lebih sustainabel dibandingkan dengan LKM konvensional pada beberapa kasus di Pakistan. Namun demikian studi ini tidak membandingkan secara lebih jelas komparasi keduanya dan hanya menganalisis dengan pendekatan normatif kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang orientasi budaya dan religiusitas dalam manajemen kredit di BPR dan melihat pengaruhnya terhadap capaian kinerja sosial atau jangkauan BPR. Studi ini berkontribusi dalam memperluas prediktor dari capaian kinerja sosial BPR dengan budaya dan religiusitas dan juga menawarkan model yang lebih mapan dalam hubungan kausal antara budaya dan religiusitas terhadap capaian kinerja sosial. Sehubungan dengan klaim dari sebagian pengamat ekonomi syariah yang menganggap bahwa lembaga keuangan syariah lebih berorientasi keadilan sosial dari lembaga keuangan konvensional, maka studi ini mencoba lebih lanjut untuk mengkomparasi capaian kinerja sosial kedua jenis LKM ini.

Kajian Literatur Dan Hipotesis

Konsep Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro dan Bank Perkreditan Rakyat

Istilah keuangan mikro merujuk pada penyediaan jasa-jasa keuangan (biasanya berupa simpanan dan kredit) kepada nasabah berpenghasilan rendah, yang mencakup pedagang kecil, pedagang kaki lima, petani kecil, penjual jasa dan tukang, serta produsen kecil (Ledgerwood,

1999). Sedangkan definisi lembaga keuangan mikro mengacu pada sebuah organisasi yang menyalurkan kredit mikro. Undang-Undang No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro memberikan definisi Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Adapun BPR, lembaga keuangan ini merupakan sebuah lembaga keuangan mikro formal namun dalam bentuk bank. Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang diamandemen dengan Undang Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan Bank Perkreditan Rakyat sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sehubungan dengan dua aliran utama dalam operasional LKM, terdapat dua pendekatan populer dalam mengkategorikan LKM yaitu pendekatan kelembagaan (*institutionalist approach*) dan pendekatan kesejahteraan (*welfarist approach*) (Brau and Gary M Woller, 2004). BPR dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro dengan pendekatan institusionalis yang bertujuan untuk mencapai kemandirian kelembagaan, melalui pencapaian keberlanjutan (*sustainability*) dan jangkauan (*outreach*). Keberadaannya akan sangat berbeda dengan LKM yang memiliki pendekatan kesejahteraan yang lebih menekankan pada tujuan untuk mengarahkan pengentasan kemiskinan melalui pinjaman, yang seringkali diberikan bersamaan dengan layanan pendukung seperti pelatihan kewirausahaan, membaca, menulis, berhitung, kesehatan, nutrisi, keluarga berencana dan lainnya (Ledgerwood & White, 2006). Salah satu LKM dengan pendekatan kesejahteraan yang paling sukses di dunia adalah pemberdayaan sektor produktif oleh Grameen Bank di Bangladesh.

Keluasan Jangkauan

Keluasan jangkauan merupakan salah satu proksi terbaik dalam pengukuran kinerja sosial sebuah LKM. Jangkauan adalah upaya untuk memperluas layanan keuangan mikro kepada orang-orang yang tidak dilayani oleh lembaga keuangan formal (Lafourcade, Isern, Mwangi, & and Matthew Brown, 2005; Yaron, 1997; Okumu, 2007). Meskipun jangkauan bukan merupakan indikator yang sempurna untuk menilai dampak LKM terhadap pembangunan ekonomi, namun indikator ini adalah salah satu proksi terbaik yang mampu memperlihatkan kondisi tentang sejauh mana LKM telah mencapai tujuannya dalam memberikan manfaat sosial bagi masyarakat miskin. Schreiner (1999) membagi aspek jangkauan menjadi enam aspek utama yaitu *worth of outreach* (nilai jangkauan), *cost of outreach* (biaya jangkauan), *depth of outreach* (kedalaman jangkauan), *breadth of outreach* (keluasan jangkauan), *length of outreach* (lamanya jangkauan) dan *scope of outreach* (ruang lingkup jangkauan). *Worth of outreach* mengacu pada kesediaan nasabah untuk membayar pembiayaan, *cost of outreach* mengacu pada biaya yang harus dibayar oleh nasabah seperti biaya bunga / margin dan biaya transaksi lainnya, *depth of outreach* mengacu pada kedalaman manfaat sosial yang diperoleh masyarakat, *breadth of outreach* berhubungan dengan jumlah klien yang dilayani oleh LKM. Adapun *length of outreach* adalah kerangka waktu pasokan keuangan mikro, yang tidak hanya diukur dari sekadar tingkat keuntungan dan *scope of outreach* merupakan jenis kontrak keuangan yang ditawarkan baik pada produk pendanaan maupun pada produk pembiayaan.

Selain itu, terdapat beberapa jenis pengukuran lainnya tentang jangkauan (Yaron, 1997; Paxton, 2002; USAID, 2006; Millson, 2013), tetapi menurut Rhyne (1998) ada dua aspek populer dari jangkauan yaitu kedalaman dan keluasan. Kedalaman jangkauan mengacu pada tingkat kemiskinan klien yang dilayani, sedangkan kelusan jangkauan mengacu pada skala operasi lembaga keuangan mikro. Kedua konsep ini banyak digunakan dalam literatur lembaga keuangan mikro sebagai ukuran kinerja sosial suatu lembaga keuangan.

Sosial Ekonomi Budaya

LKM adalah sebuah tata kelola yang dinamis, inovatif dan fleksibel, yang dibuat dengan menyesuaikannya dengan kondisi lingkungan sosial dan ekonomi. LKM beroperasi di daerah di mana kondisi sosial ekonomi memengaruhi dan dipengaruhi olehnya. Keberlanjutan suatu lembaga tergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi dan mengikuti lingkungan sosial ekonomi (Weber & Musshoff, 2013; Wollni, 2001). Faktor-faktor sosial ekonomi seperti pendapatan, fertilitas, pendidikan dan agama berpengaruh pada profitabilitas dan risiko sebuah LKM (Al-azzam & Ali, 2012). Begitu juga dengan budaya organisasi, yang terkait dengan sistem dan nilai-nilai, norma, dan kepercayaan yang dimiliki oleh anggota organisasi (Robbins & Judge, 2009; Hofstede, 1984). Sedangkan budaya lokal mengacu pada nilai-nilai eksternal masyarakat yang perlu dipahami untuk membantu lembaga keuangan mikro dalam menemani klien mereka (Leonard, 2010; Woller, 2002; Rana, 2008; Oscar, 1966). Beberapa nilai budaya lokal yang teridentifikasi berpengaruh dalam menciptakan lembaga keuangan mikro berdasarkan pada budaya meliputi keberadaan produk dan layanan yang unik, jaminan non-tradisional, keterlibatan pemimpin adat pemimpin agama dalam manajemen kredit, memprioritaskan personil pemasaran kredit dari masyarakat lokal, layanan pendampingan kredit dan lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

H₁: Budaya berpengaruh positif terhadap keluasan jangkauan

Religiusitas

Religiusitas adalah tingkat kepercayaan pada nilai-nilai agama dan penerapannya dalam kehidupan. Religiusitas juga merupakan sebuah komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip yang diyakini dan telah ditetapkan oleh Tuhan (McDaniel & J. Burnett, 1990) dan merupakan ukuran dari tingkat kepatuhan untuk bertingkah laku dan percaya pada Tuhan (Shafranske & Maloney, 1990). Religiusitas adalah peringkat seseorang dalam menggunakan nilai-nilai agama, kepercayaan, dan praktik keagamaan dalam kehidupan sehari-hari mereka (Warthinton & N.G., 2003).

Implementasi religiusitas di lembaga keuangan dapat diwujudkan dalam bentuk lingkungan keagamaan dan tata kelola yang akan memperkuat transaksi berdasarkan nilai-nilai agama. Studi yang berkaitan dengan pengaruh aspek religiusitas terhadap performa social sebuah LKM masih sangat terbatas, terutama yang mengkuantifikasi hubungan tersebut. Studi Hans & Seibel (2007) dan Fahmi & Beik (2016) menekankan pentingnya aspek keagamaan dalam memperkuat keberadaan lembaga keuangan mikro di Indonesia dan Aslam (2015) mencerminkan harapan yang sama tentang peran LKMS dalam perekonomian Pakistan. Perilaku budaya Bali, yang terkait erat dengan kepercayaan agama, mempengaruhi keberadaan LKM (Arsyad, 2008). Berdasarkan argumen teoritis dan studi empiris sebelumnya, hipotesis kedua yang diajukan adalah :

H₂: Religiusitas berpengaruh positif terhadap keluasan jangkauan

Kinerja sosial BPR dan BPRS. Adakah perbedaan keduanya?

Terkait dengan banyak pertanyaan yang mencoba untuk mengelaborasi lebih lanjut, apakah berbeda dinamika jangkauan antara lembaga keuangan mikro konvensional dengan lembaga keuangan mikro syariah? Atau berbedakah capaian kinerja sosial antara kedua jenis tipe LKM ini?, tidak banyak literature yang dapat dijadikan acuan untuk dapat menjawabnya. Keterbatasan studi akibat masih terbatasnya jaringan lembaga keuangan mikro syariah serta pembenaran dari sebagian pengamat ekonomi syariah yang sudah terlanjur mengklaim bahwa lembaga keuangan mikro syariah lebih berorientasi sosial dibanding dengan LKM konvensional, menyebabkan belum jelasnya jawaban terhadap perbedaan ini. Wilson (2001),

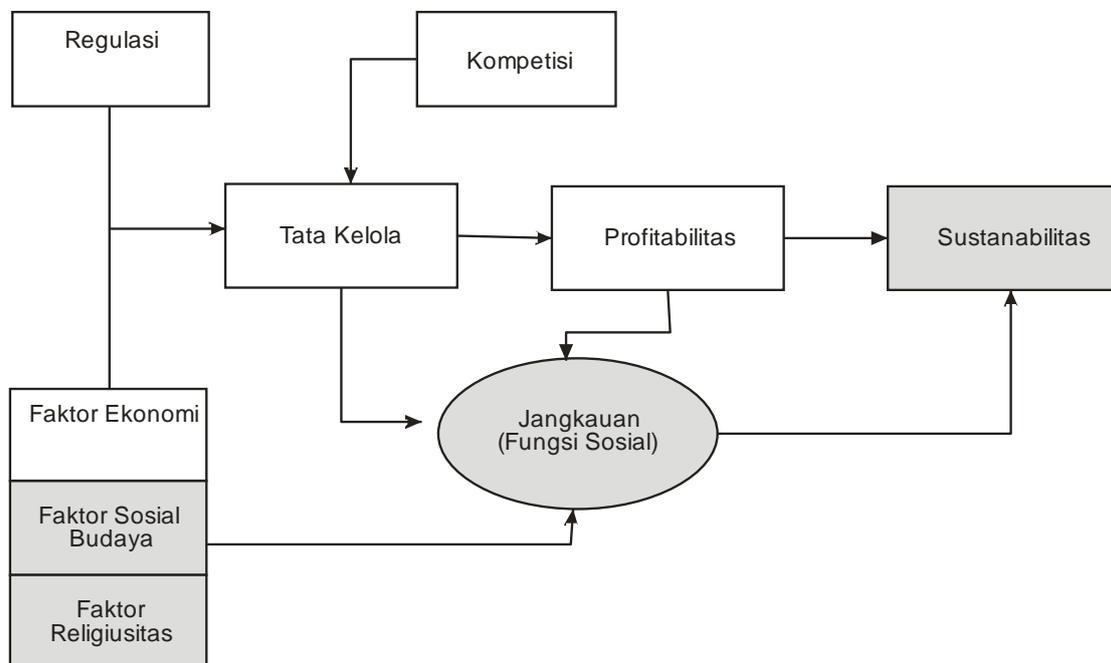
Naceur, Barajas, & and Alexander Massara (2015), Mansori & Safari (2015) dan Wilson (2013) memberikan proposisi akan pentingnya keberadaan lembaga keuangan mikro Islam dalam meningkatkan keuangan inklusif. Farooq & Khan (2014) membuktikan bahwa LKM Islam lebih sustainabel dibandingkan dengan LKM konvensional untuk beberapa kasus di Pakistan. Untuk pengujian lebih lanjut, studi ini mencoba untuk membandingkan capaian kinerja sosial antara kedua jenis lembaga keuangan mikro ini, dan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H₃: Ada perbedaan antara keluasan jangkauan BPR dan BPR Syariah

Model Empiris

Komersialisasi terkait dengan profitabilitas, regulasi, dan kompetisi, sedangkan faktor non komersialisasi terkait dengan aspek sosial ekonomi, budaya dan religiusitas. Determinan terkait komersialisasi sudah dibahas dalam beberapa riset terdahulu sedangkan determinan yang terkait dengan aspek non komersialisasi masih menjadi prediktor yang diperdebatkan dampaknya terhadap kinerja sosial lembaga keuangan mikro. Semua faktor ini mempengaruhi kinerja sosial (yang diproksi dengan jangkauan) secara langsung atau dimediasi oleh tata kelola. Studi ini fokus pada budaya dan religiusitas dan dampaknya terhadap jangkauan, sebagai indikator terbaik untuk menilai capaian kinerja sosial BPR. Lebih lanjut jangkauan dan sustanabilitas memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Model hubungan ini diperluas dari konsep teoritis dan berbagai studi terkait (R.P Christen, 2001; Schreiner, 2002; Olivares-Polanco, 2005; Leonard, 2010; Woller, 2002; Deubeul, 2003; Seibel, 2013; Aslam, 2015; Arsyad, 2008)

**Gambar 1
Model Empiris**



METODE PENELITIAN

Data

Populasi dalam penelitian ini adalah BPR-BPR yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017, yaitu sejumlah 92 unit BPR dan 7 BPR Syariah. Penelitian dilakukan di empat kabupaten dan dua kota yang dipilih secara purposive yang meliputi: Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, dan Kota Solok. Alasan pemilihan daerah ini adalah karena kesamaan kondisi sosio-demografis dan distribusi BPR di daerah ini terlihat lebih baik daripada yang lain. Selain itu, di daerah ini juga terdapat dua jenis BPR yang terdiri dari BPR konvensional dan BPRS di daerah ini. Sampel penelitian meliputi semua BPR aktif yang berada di daerah terpilih sejumlah 52 unit BPR. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuisioner yang di kombinasikan dengan wawancara pada pimpinan BPR.

Variabel dan Instrumen

Keluasan jangkauan adalah variabel endogen dalam penelitian ini, yang merupakan proksi terbaik dari penilaian capaian kinerja sosial. Untuk bisa mengukur keluasan jangkauan digunakan instrumen pengukuran yaitu jumlah nasabah kredit aktif yang dilayani oleh BPR. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah budaya dan religiusitas. Instrumen pengukuran yang digunakan dalam mengukur budaya adalah manajemen kredit/pembiayaan berorientasi budaya dan religiusitas di ukur dengan manajemen kredit/pembiayaan berorientasi religiusitas. Untuk mengukur variabel ini, responden ditanyai tentang pendapat mereka menggunakan skala likert 5 point, dengan pilihan jawaban yang mencakup “Tidak Pernah, Jarang, Terkadang, Sering dan Selalu”. Instrumen yang digunakan untuk mengukur budaya dan religiusitas terlihat pada tabel 1.

Tabel 1
Variabel dan Instrumen

Manajemen Berorientasi Budaya	
Budaya 1	: Ada produk BPR yang bersifat unik/khas daerah /berbeda dengan BPR lainnya. Seperti kredit/pembiayaan pernikahan, kredit/pembiayaan pendidikan dan lainnya
Budaya 2	: Ada layanan BPR yang bersifat unik/khas/berbeda dengan BPR lainnya. Seperti: cicilan pinjaman <i>bajapuik</i> (dijemput ke nasabah)
Budaya 3	: Dalam penyaluran kredit/pembiayaan, BPR/S melibatkan tokoh-tokoh adat atau tokoh agama untuk informasi saat kelayakan kredit
Budaya 4	: Dalam mengatasi kredit/pembiayaan bermasalah, BPR/S melibatkan bantuan tokoh-tokoh adat atau tokoh agama sebagai mediator
Budaya 5	: Terdapat nasabah kredit dengan jaminan non-tradisional spt: Jaminan personal oleh tokoh adat/tokoh agama, Jaminan pihak ketiga, jaminan solidaritas kelompok dan lainnya
Budaya 6	: Ada rekrutmen tenaga marketing kredit (account officer) yang berasal masyarakat lokal sekitar BPR
Budaya 7	: Ada kelompok-kelompok pendampingan nasabah kredit pada BPR/S ini
Manajemen Berorientasi Religiusitas	
Religiusitas 1	: Transaksi bebas dari kegiatan spekulatif (maysir), hal-hal yang meragukan (gharar) dan tidak jelas kehalalannya seperti usaha kolam pancing
Religiusitas 2	: Produk-produk bebas dari fitur melanggar syariah seperti undian

	berhadiah atau iklan tidak islami
Religiusitas 3	: Perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan dengan pendekatan keagamaan Misal: pembacaan basmallah pada akad atau konten akad mengandung unsur keislaman lainnya
Religiusitas 4	: Sumber dana (Linkage Program) BPR/S berasal dari Bank Umum Syariah
Religiusitas 5	: Ada informasi kepada nasabah bahwa produk pembiayaan sesuai dengan kebutuhan mereka
Religiusitas 6	: Ada program pembinaan, pendampingan dan monitoring dilakukan dengan pendekatan syariah seperti memberikan arahan tentang konsep wirausaha Islami dan sikap amanah dalam berinvestasi
Religiusitas 7	: Adanya program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) yang berlandaskan syariah yang rutin dilaksanakan oleh BPR/S
Religiusitas 8	: Adanya implementasi vertikal kepada Allah SWT : melalui keterlibatan BPR/S dalam pengembangan sarana ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekitar BPR/S
Religiusitas 9	: Adanya implementasi horizontal kepada masyarakat: dalam bentuk kegiatan sosial seperti : memberikan beasiswa, pendirian sarana pendidikan bagi masyarakat atau penguatan ekonomi lokal bagi masyarakat sekitar BPR/S
Religiusitas 10	: Adanya implementasi horizontal kepada karyawan: dalam bentuk pengembangan skill dan program pengembangan perilaku karyawan sesuai syariah

Metode Analisis

Studi ini mengestimasi pengaruh budaya dan religiusitas terhadap keluasan jangkauan BPR dengan menggunakan Regresi-PLS. Keluasan jangkauan merupakan variabel endogen dalam model penelitian ini, yang di ukur dengan jumlah nasabah kredit yang dilayani oleh BPR. Manajemen berorientasi budaya adalah variabel eksogen yang diukur dengan menggunakan tujuh indikator sedangkan manajemen berorientasi religiusitas juga merupakan variabel eksogen yang diukur dengan 10 instrumen. Untuk menganalisis model kausalitas digunakan analisis jalur dengan program SEM-PLS, dengan pertimbangan SEM-PLS dapat berjalan secara efisien dengan ukuran sampel yang kecil, adanya variabel laten dan model yang kompleks (Hair, C.M., & Sarstedt, 2013) dan program ini cocok untuk memproses hubungan sebab akibat antar variabel dengan dukungan dari teori yang tidak stabil.

Untuk membandingkan keluasan jangkauan antara BPR konvensional dan BPR Syariah digunakan uji-t untuk dua sampel independen (Salvatore & Derrick, 2002)

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Catatan: n_1 adalah sampel untuk kelompok 1 (BPR Konvensional), n_2 adalah sampel untuk kelompok 2 (BPR Syariah), s_1 = varians kelompok 1, s_2 = varians kelompok 2, \bar{X}_1 = keluasan jangkauan BPR Konvensional, \bar{X}_2 = Keluasan jangkauan BPR Syariah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Jalur

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa indikator pada model fit telah memenuhi secara statistik. Nilai *Average Path Coefficient* (APC) memperlihatkan rata-rata pengaruh variable eksogen (budaya dan religiusitas) terhadap variabel endogen (keluasan jangkauan) sebesar 0.336 ($p < 0.001$). Nilai *Average R-squared* (ARS) juga memperlihatkan nilai rata-rata R-squared pada masing-masing jalur sebesar 0.303, ($p < 0.001$) dan angka ini terkategori rendah. Nilai *Average Path Coefficient* (APC) dan *Average R-squared* (ARS) ini berada pada kategori rendah jika penelitian bertujuan untuk menaksir kontribusi masing masing variabel eksogen terhadap variabel endogen, namun studi ini tidak fokus pada besaran magnitude dari kontribusi, melainkan menguji hipotesis tentang hubungan keterkaitan antara variabel laten eksogen dengan variabel endogen nya. Studi ini fokus dalam menguji hipotesis keterkaitan antara manajemen kredit berorientasi budaya dan religiusitas terhadap capaian kinerja sosial.

Semakin besar APC dan ARS mengindikasikan bahwa prediktor yang ada dalam model semakin baik dalam menjelaskan varians, namun jika angka ini melebihi 0.70 maka terindikasi adanya gejala *collinearity* dalam model. Lebih lanjut, indikasi adanya *collinearity* dalam model PLS dapat dilihat dari nilai *Average block VIF* (AVIF) dan *Average full collinearity VIF* (AFVIF). Hasil temuan penelitian memperlihatkan bahwa nilai untuk kedua indikator ini adalah sebesar 1.091 dan 1.322. Batas ideal untuk nilai ini direkomendasi lebih kecil atau sama dengan 3.3 (Kock, 2013). Dengan demikian, model penelitian ini bebas dari persoalan *collinearity*. Secara keseluruhan, hasil model fit mengungkapkan bahwa performa model cukup baik dan memenuhi kriteria statistik. Dengan demikian hasil evaluasi ini menyimpulkan bahwa *Partial Least Squared-Structural Equation Model* (PLS-SEM) dapat dilanjutkan dengan evaluasi model pengukuran (*Measurement Model Analysis*) dan evaluasi model structural (*Structural Model Analysis*).

Untuk menganalisis indikator yang memenuhi kriteria sebagai indikator yang reliabel dalam membangun sebuah variabel laten eksogen, nilai bobot indikator (*Indicator Weight*) pada hasil *outer model* (evaluasi model pengukuran) dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Hasil evaluasi model pengukuran digunakan untuk mengevaluasi hubungan keterkaitan antara indikator dan konstruk laten dalam model dengan menilai angka reliabilitas dan validitas. Fornell & Larcker (1981) menganjurkan nilai *composite reliability* dan *Cronbach's Alpha* mesti berada diatas 0.7 untuk reliabilitas. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* untuk masing masing konstruk dalam model melebihi 0.7.

Table 2
Bobot Indikator

Variabel	Indikator	Bobot Indikator	P value	VIF
Budaya	Budaya1	0.194	0.025	1.276
	Budaya 2	0.137	0.081	1.270
	Budaya 3	0.299	0.002	2.717
	Budaya 4	0.300	0.002	2.684
	Budaya 5	0.143	0.072	1.256
	Budaya 6	0.183	0.032	1.436
	Budaya 7	0.303	0.001	1.926
Religiusitas	Religiusitas1	-0.014	0.442	6.774
	Religiusitas2	0.028	0.385	3.496
	Religiusitas3	0.022	0.409	1.936

<i>Cronbach's alpha</i> = 0.802	Religiusitas4	-0.050	0.303	4.584
	Religiusitas5	0.207	0.018	6.309
	Religiusitas6	0.192	0.026	8.020
	Religiusitas7	0.168	0.044	1.916
	Religiusitas8	0.210	0.017	11.122
	Religiusitas9	0.195	0.024	3.759
	Religiusitas10	0.182	0.032	2.365

Catatan: VIF = variance inflation factor;

Untuk menganalisis nilai validitas masing-masing indikator formatif dalam model, acuan penting dalam analisis model pengukuran adalah dengan menganalisis nilai bobot indikator. Tabel 2 memperlihatkan output dari dari bobot indikator untuk masing-masing variabel laten yang digunakan dalam model. Terlihat bahwa beberapa bobot indikator yang memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0.05 tidak dapat digunakan dalam model. Indikator yang dikeluarkan dari model adalah budaya2, budaya5, religiusitas1, religiusitas2, religiusitas3 dan religiusitas4. Indikator-indikator ini tidak memenuhi standar secara statistik.

Selanjutnya, untuk menguji hipotesis dalam studi ini, sebuah evaluasi model struktural (*Inner Model*) mesti dilakukan seperti yang terlihat pada tabel 3. Hubungan langsung antara budaya dengan keluasan jangkauan adalah 0.241 (p value = 0.008). Hipotesis H₁: Budaya berpengaruh positif terhadap keluasan jangkauan, didukung oleh model. Selanjutnya teramati bahwa pengaruh langsung antara religiusitas terhadap keluasan jangkauan di perlihatkan dengan koefisien jalur sebesar 0.431 (p value <0.001). Hipotesis H₂: Religiusitas berpengaruh positif terhadap keluasan jangkauan, juga di dukung oleh model.

Tabel 3
Analisis Jalur

Jalur	Koefisien	p values
Budaya → Keluasan Jangkauan	0.241***	0.008
Religiusitas → Keluasan Jangkauan	0.431***	<0.001

Catatan: ***, **, * signifikan pada 1%, 5% dan 10%

Hasil estimasi dari koefisien jalur menyimpulkan bahwa aspek budaya dan religiusitas yang diterapkan dalam manajemen kredit memiliki efek positif terhadap keluasan jangkauan BPR. Semakin baik aspek budaya diterapkan dalam manajemen kredit akan menyebabkan peningkatan pada keluasan jangkauan. Demikian juga penerapan religiusitas dalam manajemen kredit adalah positif. Semakin baik aspek religiusitas yang diterapkan dalam manajemen kredit maka akan semakin meluas jangkauan BPR.

Temuan penelitian ini menjawab hipotesis yang dibangun berdasarkan penelitian sebelumnya yang memberikan proposisi tentang pengaruh budaya pada keluasan jangkauan (Deubeul, 2003; Arsyad, 2008; Phlong, 2002; Erdmann et al., 2012; Rana, 2008). Studi ini mengkuantifikasi hubungan signifikan dari beberapa indikator budaya dalam meningkatkan keluasan jangkauan, yang meliputi: 1) Ada produk BPR yang bersifat unik/khas daerah/berbeda dengan BPR lainnya. 2) BPR/S melibatkan tokoh-tokoh adat atau tokoh agama untuk informasi saat kelayakan kredit 3) BPR/S melibatkan bantuan pemimpin tradisional atau pemuka agama sebagai mediator dalam mengatasi kredit/pembiayaan bermasalah, 4) Ada rekrutmen tenaga marketing kredit (*account officer*) yang berasal masyarakat lokal sekitar BPR, 5) Ada kelompok-kelompok pendampingan nasabah kredit pada BPR/S.

Berdasarkan temuan penelitian ini terungkap bahwa beberapa kebijakan manajemen kredit/ pembiayaan yang berorientasi budaya lokal di BPR/S mampu meningkatkan jumlah nasabah pinjaman yang dilayani. Hal ini juga berarti semakin meluasnya jangkauan BPR/S ke masyarakat atau meningkatnya kinerja sosial sebuah lembaga keuangan. Apa yang menjadi

target tercapainya sebuah fungsi sosial di LKM, dapat dilakukan dengan mengupayakan manajemen kredit/pembiayaan yang berorientasi budaya lokal.

Studi ini juga memperkuat keberadaan proposisi sebelumnya yang mengungkapkan pentingnya aspek religiusitas dalam memperkuat eksistensi lembaga keuangan mikro terhadap sektor riil (Hans & Seibel, 2007; Aslam, 2015). Penelitian ini menyimpulkan adanya pengaruh positif dari beberapa indikator religiusitas terhadap keluasan jangkauan, terutama pada beberapa indikator yang meliputi: 1) Ada informasi kepada pelanggan bahwa produk sesuai dengan kebutuhan mereka, 2) Ada program pelatihan, pendampingan dan pemantauan dilakukan dengan pendekatan syariah Islam, 3) Adanya program *Corporate Social Responsibility* (CSR) berbasis syariah yang secara rutin dilakukan oleh BPR, 4) Adanya implementasi vertikal kepada Allah SWT melalui keterlibatan BPR dalam mengembangkan fasilitas ibadah dan kegiatan keagamaan di sekitar BPR, 5) Adanya implementasi horizontal kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan sosial, 6) Adanya implementasi horizontal kepada karyawan dalam bentuk pengembangan keterampilan dan program pengembangan perilaku karyawan sesuai dengan nilai islam.

Analisis Komparatif: *Independent Sample T Test*

Hasil uji *independent sample t test* untuk kedua jenis lembaga keuangan yaitu BPR konvensional dan BPR Syariah, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan dalam keluasan jangkauan kedua jenis lembaga keuangan mikro ini. Nilai uji-t 1.698 hanya signifikan pada tingkat signifikansi 0,183.

Table 4
Independent Sample T-Test

Variabel	Grup	Rata-Rata	T	Sig.
Keluasan Jangkauan	BPR Syariah	1074	1,698	0,183***
	BPR Konvensional	742		

Catatan: ***, **, * signifikan pada 1%, 5% dan 10%

Hasil pengujian pada tabel 4 memperlihatkan bahwa rata-rata jumlah nasabah BPR Syariah adalah 1074 orang. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata jumlah nasabah BPR Konvensional sejumlah 742 orang. Meski demikian, temuan penelitian ini memperlihatkan hasil pengujian ini tidak signifikan secara statistik, yang berarti terdapat tidak ada perbedaan keluasan jangkauan. Dengan kata lain tidak ada perbedaan capaian kinerja sosial antara BPR Konvensional dengan BPR Syariah. Religiusitas yang merupakan satu-satunya variabel yang membedakan antara BPR Konvensional dan BPR Syariah memiliki filosofi yang berbeda dalam penerapannya. Religiusitas di BPR Syariah adalah sebuah komitmen dalam organisasi, yang harus mengikuti "indikator kepatuhan syariah", yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Namun, penerapan religiusitas pada BPR konvensional hanya sebagai kearifan lokal dalam mendukung manajemen operasional organisasi.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan pada bagian terdahulu dari tulisan ini, studi ini menyimpulkan bahwa penerapan manajemen kredit berorientasi budaya merupakan sebuah inovasi dalam manajemen operasional BPR. Penerapan manajemen berorientasi budaya pada BPR Konvensional dan BPR Syariah merupakan sebuah kearifan lokal yang diharapkan dapat memperluas jangkauan lembaga keuangan atau meningkatkan capaian kinerja sosial. Meski demikian, penerapan manajemen berorientasi religiusitas di BPR Konvensional dan BPR Syariah memiliki tujuan yang berbeda. Manajemen berorientasi religiusitas di BPR Syariah merupakan sebuah tuntutan dari sebuah komitmen organisasi yang menjalankan bisnis dalam

prinsip-prinsip Islam, sedangkan penerapan manajemen berorientasi religiusitas di BPR konvensional adalah sebagai bagian dari kearifan budaya lokal dalam upaya menjangkau lebih banyak nasabah.

Temuan penelitian ini memperkuat dugaan dari studi terdahulu yang menjadi proposisi tentang pentingnya budaya dalam mempengaruhi eksistensi sebuah lembaga keuangan mikro (Deubeul, 2003; Arsyad, 2008; Phlong, 2002; Erdmann et al., 2012; Rana, 2008), dan pentingnya aspek religiusitas dalam mempengaruhi jangkauan lembaga keuangan mikro ke sektor rill (Seibel, 2013; Fahmi et al., 2016; Aslam, 2015). Temuan ini dapat menjadi penelitian pendahuluan bagi penelitian mendatang, karena penelitian yang dikuantifikasi tentang masalah ini masih terbatas untuk ditemukan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang tidak mengkuantifikasi dampak dari manajemen berorientasi budaya dan religiusitas terhadap keluasan jangkauan, penelitian ini telah mencoba membuktikan secara empiris pengaruh budaya dan religiusitas pada keluasan jangkauan dan memberikan kontribusi pada perluasan teori, terutama dalam membangun hubungan kausal antara budaya, religiusitas dan keluasan jangkauan.

Temuan ini juga menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan keluasan jangkauan antara BPR Konvensional dengan BPR Syariah, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan capaian kinerja sosial antara BPR Konvensional dengan BPR Syariah. Dengan kata lain, perbedaan dalam pola operasional tidak membuat perbedaan dalam hal jangkauan atau capaian kinerja sosial. Klaim banyak pengamat bahwa perbankan syariah lebih berorientasi “*social justiced*” atau lebih berorientasi sosial dibanding bank konvensional tidak terbukti dalam penelitian ini. Tidak ada jaminan bahwa BPR syariah memiliki kinerja sosial yang lebih baik daripada BPR konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlin, C., Lin, J., & Michael Maio. (2011). “Where Does Micro Finance Flourish ? In *Micro Finance Institution Performance in Macroeconomic Context*” 95 (pp. 105–20). <https://doi.org/doi:10.1016/j.jdeveco.2010.04.004>
- Al-azzam, M., & Ali, M. A. (2012). The Impact of Socioeconomic Factors and Financial Access on Microfinance Institutions. <https://doi.org/doi:10.5539/ijef.v4n4p61>
- Arsyad, Lincolin. (2008). *Lembaga Keuangan Mikro; Institusi, Kinerja & Sustainabilitas.*, Penerbit: CV Andi Offset.
- Aslam, M. N. (2015). Role of Islamic Microfinance in Poverty Alleviation in Pakistan : An Empirical Approach. <https://doi.org/doi:10.6007/IJARAFMS/v4-i4/1288>
- Brau, J. C., & Gary M Woller. (2004). Microfinance : A Comprehensive Review of the Existing Literature Microfinance : A Comprehensive Review of the Existing Literature. *Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures*, 9(1), 1–28.
- Christen, R. P., & Rhyne, E. (1995). Maximizing the Outreach of Microenterprise Finance: The Emerging Lessons of Successful Programs. *USAID, CAER Consulting Assistance on Economic Reform. Discussion Paper*, 32.
- D. Larcker, C. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, 18, 39–50.
- Deubeul, T. F. (2003). “Banking on Culture: Microcredit as incentive for cultural conservation. In *Mali, on Microfinance*”. *Perils and Prospects, Routledge Series on Economic Development, 2006, edited by Jude L Fernando.*
- Erdmann, J., Horne, C., Kaletta, C., & Marius Wagner. (2012). “Microfinance and Culture The Impact. In *of Microcredits on Culture in Kenya,*” (pp. 1–13).
- Farooq, M., & Khan, Z. (2014). The Social and Financial Performance of Conventional and Islamic Microfinance Institutions in Pakistan. *Journal Al-Idah.*
- Gakhar, K. (2015). “Financial Performance and Outreach Of Microfinance Institutions : Is

- There A Trade- Off? - An Empirical Study Of Indian”, 7(4), 1–10.
- Gashayie, A. (2014). Relationship Of Financial Sustainability And Outreach In Ethiopian Microfinance Institutions : Empirical Evidence. *Research Journal of Finance and Accounting*. ISSN, 2222(1697), 5–17.
- Hair, J. F. R., C.M., & Sarstedt, M. (2011). . “PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet.” *Journal of Marketing Theory and Practice*, 19(2), 139–151.
- Hans, P., & Seibel, D. (2007). The Role of Microfinance in Rural Microenterprise Development The Role of Microfinance in Rural Microenterprise Development, 8616(February).
- Hofstede, G. (1984). *Culture’s Consequences Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations* (2nd edn). CA: Sage Thousand Oaks.
- Kaur, P. (2014). “Outreach and Sustainability of Microfinance. In *Institutions in India in Pre and Post Andhra Pradesh Microfinance Crisis in Context of South Asia*” (Vol. 6, pp. 569–74).
- Lafourcade, A.-L., Isern, J., Mwangi, P., & and Matthew Brown. (2006). Overview of the Outreach and Financial Performance of Microfinance Institutions in Africa. *MIX Bulletin*.
- Ledgerwood, J. (1999). *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective*. Washington, DC: The World Bank.
- Ledgerwood, J., & White. (1999). Transforming Microfinance Institutions Providing Full Financial Services to the Poor. *The World Bank-Microfinance Network*.
- Leonard, M. (2010). Microsave – Market-Led Solutions For Financial Services Microsave Fokus. *Notes No:20*. Retrieved from www.MicroSave.org
- Mansori, S. C. S. K., & Safari, M. (2015). A Shariah Perspective Review on Islamic Microfinance. *Asian Social Science*, 11(9).
- McDaniel, S. W., & J.Burnett, J. (1990). Consumer Religiosity And Retail Store Evaluative Criteria. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 18, 101–112.
- Millson, H. F. (2013). The Trade-Off Between Sustainability And Outreach : The Experience Of Commercial Microfinance Institutions. In *Department of Economics Advisor*. Shannon Mudd.
- Naceur, S. Ben, Barajas, A., & and Alexander Massara. (2015). “Can Islamic Banking Increase Financial Inclusion?”. IMF Working paper.
- Nw, A. M., Fahmi, I., & Beik, I. S. (2016). How Islamic is Islamic Banking in Indonesia ?, 29(2), 153–165.
- Okumu, L. J. (2007). The Microfinance Industry in Uganda : Sustainability, Outreach and Regulation. *ADB Economics Working Paper Series*.
- Olivares-Polanco, F. (2005). Commercializing microfinance and deepening outreach? empirical evidence from Latin America. *Journal of Microfinance / ESR Review*, 7(2), 47–69. Retrieved from <https://ojs.lib.byu.edu/spc/index.php/ESR/article/view/1575>
- Oscar, L. (1966). The Culture Of Poverty. *Society*, 35(2).
- Osoimehin, K. O. C., W.L, Keer, & R. (2001). Determinants Of Microfinance Outreach In South-Western Nigeria: An Empirical Analysis. *International Journal of Management and Business Studies*, 1(1), 001–007.
- Paxton, J. (2002). Depth of Outreach and Its Relation to the Sustainability of Microfinance Institutions. *Savings and Development*, 26(1), 69–86.
- Phlong, P. (2002). Informal Credit Systems In Cambodia. A Published Thesis of.
- Qinlan, Z., & Izumida, Y. (2013). Determinants of repayment performance of group lending in China. *China Agricultural Economic Review*, 5(3), 328–341. <https://doi.org/10.1108/CAER-08-2012-0083>
- R.P, Christen. (2001). Commercialization and Mission Drift: The Transformation of

- Microfinance in Latin America., Consultative Group to Assist the Poorest. Washington, DC.
- Rama K, M. R., & Ph, D. (2014). "Concepts And Measures of Outreach and Sustainability in Microfinance Institutions : A Comprehensive Literature. *Review*", 5(21), 41–49.
- Rana, M. B. (2008). *Cultural Oriented Management Systems of Microfinance Institutions in Bangladesh*. Working Paper.
- Rhyne, E. (1998). The Yin and Yang of Microfinance: Reaching the Poor and Sustainability. *Microbanking Bulletin. Issue, 2*, 6–8.
- Robbins, S. T., & Judge, T. A. (2008). *Organizational Behavior* Published by Pearson Education (13th ed.). Inc, publishing as Prentice Hall.
- Salvatore, D., & Derrick, R. (2002). *Theory and Problem of Statistics and Econometrics.*, The McGraw-Hill Companies.
- Schreiner, M. (2002). Aspects of outreach: A framework for discussion of the social benefits of microfinance. *Journal of International Development*, 14(5), 591–603. <https://doi.org/10.1002/jid.908>
- Seibel, H. D. (2013). Culture and Governance in Microfinance: Desa Pakraman and Lembaga Perkreditan Desa in Bali, 107–108.
- Seibel, H. D., & U, P. (1997). *Microfinance in Indonesia: An Assessment of Microfinance Institutions Banking with the Poor*. Cologne.
- Shafranske, E., & Maloney, H. N. (1990). Clinical Psychologists Religious And Spiritual Orientations And Their Practice Of Psychotherapy. *Psychotherapy*, 27, 72–78.
- USAID, U. S. (2006). Evaluating MFI's' Social Performance : A Measurement Tool.
- Warthington, Elj. W., & N.G. (2003). The Religious Commitment Inventory-10:Development, Refinement and Validation of a Brief Scale for Research and Counseling. *Journal of Counseling Psychology*, 84–96.
- Weber, R., & Musshoff, O. (2013). Can flexible microfinance loans improve credit access for farmers? *Agricultural Finance Review*, 73(2), 255–271. <https://doi.org/10.1108/AFR-09-2012-0050>
- Wilson, R. (2011). "The Determinants of Islamic Financial Development and the Constraints on its Growth". The publication from the IFSB (Islamic Financial Services Board).
- Woller, G. (2002). From Market Failure To Marketing Failure : Market Orientation As the Key To Deep Outreach in, 324, 305–324. <https://doi.org/10.1002/jid.883>
- Woller, G. M. (2006). . "Evaluating MFI's Social Performance : a Measurement Tool". In *USAID (United States Agency International Development) Report*.
- Wollni, M. (2001). Assessing the poverty outreach of microfinance institutions at household and regional levels, 1–33.
- Yaron. (1997). What Makes Rural Finance Institutions Successful?., *World Bank Res. Observer*, 9, 49–70.
- Zerai, B., & Rani, L. (2012). Is There a Tradeoff between Outreach and Sustainability of Microfinance institutions ? Evidence from Indian Microfinance Institutions (MFIs), 4(2), 90–99.
- Zhang, X., & Kipesha. (2013). Sustainability, Profitability and Outreach Tradeoffs: Evidences from Microfinance Institutions in East Africa. *European Journal of Business and Management*, 5(8), 136–142.